



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD INDARTO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KPPN MAMUJU
3. NHK : 675036

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m²/100 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m²/105 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 214 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 467 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/80 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah Seluas 136 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 213.200.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.200.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	119.339.316
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.332.539.316
III. HUTANG	Rp.	52.182.677
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.280.356.639

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.